

Revolusi Mental dan Aktualisasi Pancasila

Oleh: Hendra Kurniawan

PANCASILA, dasar negara kita, lahir tanggal 1 Juni 1945. Menurut Bung Karno yang membidani lahirnya Pancasila, kelima sila itu dapat diperas menjadi Trisila yang terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan. Apabila dirasa masih kurang sederhana, sila-sila ini masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Sejak dulu memang masyarakat Indonesia tidak hanya lekat dengan keramahtamahan dan sopan santun yang tinggi, namun juga jiwa kegotongroyongan.

Sejatinya semangat gotong royong ini juga menjadi modal bagi perlawanan atas kelaliman penjajah. Gejala sanubari akan keinginan hidup sebagai bangsa merdeka didorong oleh adanya rasa tertindas dan keinginan melepaskan diri dari tekanan kolonialisme dan imperialisme bangsa asing. Eksploitasi dan penghisapan sebagai negeri jajahan dengan keuntungan yang mengalir ke kantong negara imperialis tidak sepadan dengan manfaat yang didapat oleh rakyat pemilik sah negeri ini.

Kini setelah 69 tahun Pancasila diyakini dan disepakati sebagai dasar negara, sudahkah Pancasila menjiwai setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara? Dalam pidatonya mengenai Pancasila, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila bukan dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila merupakan *philosophische grondslag* yaitu pondasi, falsafah, pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya se-

bagai dasar didirikannya bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila menjadi dasar statis yang mempersatukan dan bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis untuk mengarahkan bangsa ini mencapai tujuannya. Maka nyatalah bahwa Pancasila bukanlah pilar namun landasan atau dasar negara sekaligus ideologi nasional.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi terwujudnya cita-cita bernegara. Pancasila menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita terutama untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang saat ini masih jauh dari kenyataan. Hingga 16 tahun harapan perubahan yang diusung melalui gerakan reformasi ternyata tak kunjung membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Cita-cita reformasi justru seringkali dibenturkan dengan kenyataan-kenyataan kehidupan berbangsa yang menjauh dari nilai-nilai Pancasila.

Gagasan Revolusi Mental

Pemikiran Joko Widodo, salah satu calon presiden mendatang, patut dikaji lebih jauh. Gagasan beliau ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang seolah kembali pada zaman Jahiliah. Tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak sektor kehidupan masyarakat yang dewasa ini sudah mengalami perbaikan dan pening-

katan secara signifikan. Kehidupan demokrasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi makro berhasil melebihi target, hingga pelaksanaan otonomi daerah merupakan buah positif dari pemerintahan saat ini. Akan tetapi di sisi lain telah terjadi dekadensi moral yang akut.

Perilaku korupsi yang semakin brutal dan terang-terangan, upaya penegakkan hukum bagaikan macan ompong, suburnya mafia hukum, ketergantungan pada kekuatan asing, pengurusan sumber daya alam oleh para pemodal, dan sekian banyak kasus yang mencabik-cabik rasa kemanusiaan dan kehormatan sebagai sebuah bangsa yang telah merdeka. Di antaranya permasalahan para pekerja Indonesia, khususnya wanita, di luar negeri yang diperlakukan bagaikan budak, diklaimnya budaya bangsa oleh negara tetangga, maraknya perilaku kekerasan, kasus predator seksual pada anak yang bagaikan fenomena gunung es, infiltrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, hingga bergesernya layanan pendidikan dan kesehatan dari institusi sosial yang nirlaba menjadi wahana bisnis yang menggiurkan. Inilah bukti bahwa Pancasila sudah berada di pinggir jurang kematiannya.

Sekarang ini penghisapan gaya baru tidak hanya dilakukan oleh negara-negara asing namun juga oleh oknum-oknum bangsa kita sendiri. Di sinilah kita perlu memaknai

perkataan Bung Karno: "Perjuanganmu lebih mudah karena mengusi penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri!" Tantangan ke depan bagi bangsa ini akan semakin berat. Upaya perubahan di berbagai sektor memerlukan syarat-syarat tertentu antara lain semangat kegotongroyongan dengan satu tekad dan cita-cita. Terkait hal tersebut, Bung Karno juga pernah menegaskan bahwa kita hendak mendirikan negara "semua buat semua", bukan hanya untuk satu atau dua golongan saja, tapi Indonesia untuk Indonesia.

Gagasan Revolusi Mental yang dilontarkan oleh Joko Widodo menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus dibarengi dengan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai landasan bernegara, Pancasila merupakan sumber keprabadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Maka dalam krisis mental saat ini, kita bukan hendak menyelamatkan Pancasila, tapi justru Pancasila yang mampu menyelamatkan tegak kokohnya negara ini. Pemikiran ini seharusnya bukan hanya menjadi agenda politik bagi Joko Widodo jika berhasil menduduki kursi kepresidenan, namun juga kewajiban bersama seluruh elemen bangsa. Saatnya diperlukan perubahan besar bagi penemuan kembali karakter dan jati diri bangsa Pancasila yang mulai sirna. ***

Hendra Kurniawan MPd. Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.